
**EVALUASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**
Oleh: Laher Ali. SE., M.Si dan Dr. A. Masrich., M.Si

Abstract

The authors are interested in taking the title Evaluation of Policy Implementation of the Integrated Administrative Service District in Central Halmahera, North Maluku. This study aims to determine how the policy evaluation and implementation PATEN enabling and inhibiting factors PATEN policy implementation. The location of this research is in the district of South Weda Central Halmahera in North Maluku province.

This study uses the theory Waynes Parson in Palumbo and the size of the policy evaluation is based on the theory that the evaluation process, the evaluation of formative and summative evaluation. policy resources, communication among organizations, characteristic of the implementing agencies, economic, social and political conditions and the tendencies of implementation.

This research uses descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques are interviews, document analysis and observation. The data obtained were processed with qualitative data analysis. Informants in this study were 1) the Regent of Halmahera, 2) Regional Secretary, 3) Assistant for Public Administration, Law and Authority, 4) Head of Governance Regional Secretariat of Central Halmahera, 5) Head of Integrated Licensing Service Agency, 6) Head Weda South 7) The community served

Based on the research results we concluded that the implementation of the PATEN in the district of South Central Halmahera Weda considered not running optimally. This is due not been reflected in the elaboration of management commitment to the programs and activities of the OPD related, yet the drafting SOP to realize the translation of the vision - the mission of the organization, there are no guidelines for minimum service standards, unclear tasks and functions of the technical team so that the conduct of licensing has not been fully included effective, institutional structure did not reflect the needs and interests of improving the service function to society, Inkonsisten and lack of support of stakeholders in the implementation of technical policy administration services licensing, not optimal formulation of technical policy administration services licensing, weak coordination between leaders and subordinates in the implementation of integrated license service with the technical team in its OPD and has not implemented the promotion and development of quality apparatus BPPT, facilities and infrastructure not meet minimum service standards have not yet optimal application of ICT-based information system

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma dari sentralisasi menuju desentralisasi yang pada hakekatnya diikuti dengan perubahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan desentralisasi tidak saja mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi pada tingkat lokal, tetapi juga dalam aspek administratif yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Labolo, 2012, 217-218).

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mendekatkan pelayanan berarti mempersempit jarak penyedia layanan terhadap penerima pelayanan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, birokrat ditempatkan sebagai penyedia layanan dan publik atau masyarakat ditempatkan sebagai penerima layanan (Sinambela, 2011, 33-34).

Saat ini, pemahaman akan pentingnya aspek pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat memang sudah merasuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak hanya di pusat, tetapi utamanya di daerah khususnya kecamatan sebagai aparatur yang paling dekat dengan masyarakat, akan tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan dalam tahap implementasi sehingga istilah kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah belum benar-benar hilang dari mindset masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaiki pola penyelenggaraan seraya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Paling tidak, ada dua alasan yang secara implisit dapat menjelaskan mengapa pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan

air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakannya. Kedua, pelayanan tersebut dinikmati pada tingkat lokal yang secara historis pun disediakan secara lokal (Ahmad, Devarajan, Khemani, dan Shah, 2005).

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Halmahera Tengah dalam Evaluasi kebijakan pelaksanaan PATEN tersebut. diantaranya adalah kapasitas dan kuantitas personil yang belum sesuai harapan, koordinasi antar instansi terkait penyelenggaraan pelayanan, serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PATEN di kecamatan, hal tersebut dapat dilihat pada data jenis izin yang paling sering diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)

Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Kebijakan merupakan suatu proses yang perlu ditempuh oleh unsur penguasa atau pemerintah dalam mengatasi isu-isu yang berkembang dalam kalangan masyarakat, di mana proses itu dianggap sebagai sebuah tujuan umum yang hendak dilakukan dalam menyikapi permasalahan dan isu-isu tersebut. Nugroho (2012:56) mengemukakan bahwa, “kebijakan publik Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini masih banyak diwarnai kepentingan publik terbatas dari masyarakat secara luas”.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Palumbo dalam Waynes Parsons (2001:549) “dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus di dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, saat implementasi hingga saat selesai implementasi”

Menurut Waynes Parsons dalam Palumbo (2001:549) “kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi

- a. **Evaluasi proses** pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Pada tahap ini diperlukan dua kali evaluasi, pertama, evaluasi desain kebijakan, untuk menilai apakah alternatif-alternatif yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat

dengan mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (*cost-benefit analysis*), yang bersifat rasional dan terukur. Kedua, Evaluasi legitimasi kebijakan untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat (*pooling*), survey.

b. Evaluasi Formatif

Yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif ini utamanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukur kinerja implementasi

c. Evaluasi Sumatif

yang dilakukan pada saat evaluasi telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif ini adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas kebijakan/program tersebut memberi dampak yang nyata pada problem yang ditangani.

Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi manajemen dalam rangka meningkatkan , mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan di tingkat kecamatan. Utamanya bagi kecamatan yang letaknya jauh dari kantor kabupaten/kota dan sulit dijangkau karena faktor kondisi geografis dan infrastuktur jalan yang belum memadai. Merespon hal tersebut maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Ketika warga masyarakat datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan pelayanan administrasi, tidak perlu lagi mendatangi setiap petugas yang berkepentingan, seperti kepala seksi, sekretaris kecamatan dan camat. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja atau loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang perizinan dan non perizinan sesuai skala dan kriteria dari bupati/walikota kepada camat (Permendagri Nomor 4 Tahun 2010).

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas

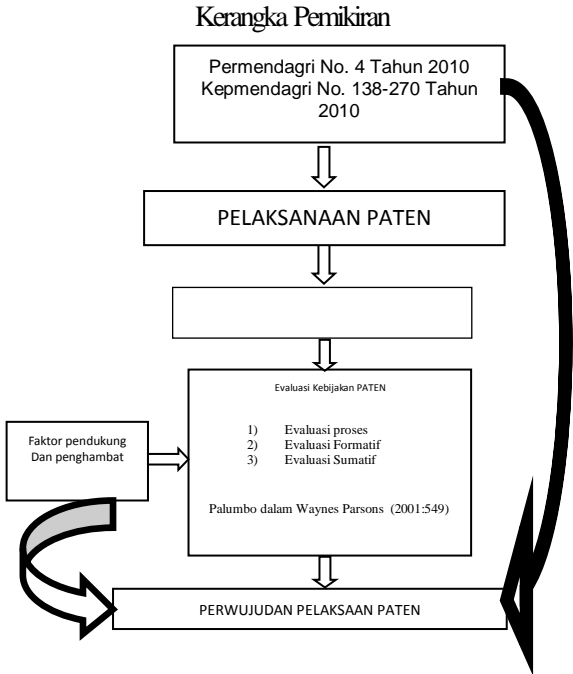
pelayanan ini terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN warga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas. Tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berarti masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih dekat baik secara jarak maupun waktu. Lokasi kecamatan jelas lebih dekat dan relatif mudah dijangkau masyarakat bila dibandingkan dengan ibukota kabupaten/kota dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit. Karena itu untuk pelayanan masyarakat sesuai skala dan kriteria kecamatan yang selama ini dijalankan oleh lembaga di tingkat kabupaten/kota hendaknya dilimpahkan pelaksanaannya di kecamatan melalui pendelegasian kewenangan.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana keefektifan sebuah kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituennya dan sejauh mana tujuan tercapai. Menurut Jones (1984: 115) bahwa “evaluasi kebijakan bertujuan menilai manfaat suatu kebijakan”.

Menurut Jones (1987: 57) bahwa *“evaluasi an activitydisigned to judges the merits of government programs which varies signifcancy in the spesificationof objects, the technigues measurement and methods of analysis”* (evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program yang berbeda secara tajam dan spesifikasi obyeknya, tehnik pengukurannya serta metode analisisnya)

Dengan makin kompleksnya tuntutan masyarakat di daerah yang membutuhkan pelayanan yang serba cepat, tepat, akurat dan transparan maka sudah sepatutnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat camat dan aparat kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Camat diharapkan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat maka inovasi dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan yang dihasilkan melalui pendekatan, metode atau alat baru

dalam pelayanan publik, inovasi yang dijalankan adalah sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. PATEN wajib dilaksanakan oleh daerah selambat-lambatnya lima tahun terhitung sejak kebijakan tersebut di keluarkan (Pasal 29 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010) namun hingga saat ini di Kabupaten Halmahera Tengah baru melakukan tahap uji coba di salah satu kecamatan yaitu kecamatan Weda Selatan. Maka penulis merasa Evaluasi kebijakan ini menarik untuk diteliti terkait pelaksanaannya, dan apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya.



Desain Penelitian

Definisi penelitian menurut Fathoni (2006:10) adalah “suatu proses atau rangkaian langkah-langkah secara sistematis dan terencana guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu”. Langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan.

Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan PATEN di Kabupaten Halmahera Tengah ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif tentu berbeda dengan

penelitian kuantitatif walaupun mungkin pada sisi tertentu memiliki unsur kesamaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam dari proses penentuan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan PATEN.

Suatu penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang benar, dan maksimal, sangat diperlukan adanya desain penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang akan diteliti sehingga desain penelitian yang ada harus disesuaikan dengan objek yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2006:51) menyatakan desain (*design*) penelitian adalah “rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan.” Penyusunan desain ini dilakukan setelah kita menetapkan topik (judul) penelitian yang akan dilaksanakan.

Hasi Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mempertegas kembali kewenangan camat. Kewenangan camat bersifat atributif tetap ada sebagai pendamping kewenangan yang didelegasikan bupati/walikota. Dalam hubungan nya, camat dipertegas menerima kewenangan dari bupati/walikota.

Prinsip utama dalam pelimpahan wewenang adalah wewenang yang dapat didelegasikan yaitu wewenang yang bersifat atributif, sedangkan wewenang yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena akan mempersulit dalam hal pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Dapat di kemukakan bahwa prinsip dalam memberikan pelimpahan wewenang harus memberikan perhatian pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Isi kebijakan menyangkut pengaruh kepentingan yang ada, keuntungan-keuntungan yang diperoleh, kejelasan tujuan, program pelaksanaan dan dukungan sumber daya baik finansial maupun personil, sedangkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan menyangkut bentuk dan indikator wewenang, kepentingan dan strategi,

karakter rezim pimpinan dan organisasi serta tanggung jawab.

Sikap politik bupati dan DPRD terkait PATEN di kabupaten Halmahera Tengah merupakan suatu bentuk pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat serta keinginan DPRD untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat merupakan faktor yang strategis untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan sebagian wewenang bukan berarti mimindahkan kekuasaan kepada camat, tetapi lebih kepada pendistribusian wewenang bupati/walikota yang dimanifestasikan sebagai kewenangan dinas/lembaga teknis daerah dalam skala dan kriteria yang relevan dengan kecamatan. Manfaat utama pelimpahan wewenang adalah mendekatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat, sehingga pelayanan menjadi lebih berkualitas, dan mempersempit rentang kendali dari bupati/walikota kepada masyarakat.

Sedangkan sikap politik DPRD berhubung dengan kebijakan anggaran yang dialokasikan kepada kecamatan sebagai akibat dari adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati/walikota kepada camat. Kemauan politik bupati dan DPRD diperlukan untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat, seketika, mudah dan murah serta berdaya lingkup setempat.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses ialah pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan di laksanakan

a. Desain Kebijakan

Desain Kebijakan, ialah untuk menilai apakah alternative-alternatif yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (*cost-benefit analysis*), dan lain lain yang bersifat rasional dan terukur (Wayne Parsons (2001, h. 549) yang diadaptasi dari Palumbo). Terkait dengan teori tersebut di atas maka, sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Bapak Ir. Basri Amal, MM. Pada

hari Selasa tanggal 16 juni 2015 mengatakan bahwa :

“Tidak ada alternatif lain kecuali dengan sistem pelayanan administarsi terpadu kecamatan ini lah yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan biaya murah serta waktu yang sangat singkat sehingga tercipta kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan, sekalipun di Kabupaten Halmahera Tengah baru melakukan tahap uji coba di kecamatan weda selatan dari 10 kecamatan yang ada di Halteng ini,hal bisa di kembangkan di kecamatan lain namun kita akan lihat hasil uji coba di kecamatan weda selatan satu tahun kedepan dan model kebijakan seperti inilah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terukur dan rasional. Dan akan kami melakukan evaluasi secara berkala untuk terus melihat perkembangannya”

Asisten bidang pemerintahan dan kepomongprajaan Kabupaten Halmahera Tengah Bapak Drs. Saiful Samad, M.Si pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 mengatakan bahwa:

“Dengan adanya sebuah sistem pendekatan melalui paten ini maka kebutuhan dan kepentingan masyarakat di tingkat kecamatan dan seluruh pelosok desa bisa melakukan pengurusan dengan mudah dan cepat dengan biaya murah. Tanpa adanya diskriminasi terhadap masyarakat

Begitu pula hal yang sama di sampaikan oleh kepala Bagian Tata pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Tengah bapak Bahri Sudirman, SH. MH pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 mengatakan bahwa : “Penerapan paten ini perlu di pantau penyelenggarannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta manfaat yang di terima masyarakat, sehingga apa yang menjadi sasaran serta tujuan dari kebijakan paten ini bisa terpenuhi”

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Drs. Abdurrahim Yau kepala Badan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Jumat Tanggal 19 Juni 2015 mengatakan bahwa :

“Solusi yang paling tepat melalui pola pendekatan PATEN ini sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin mudah cepat dan terjangkau, namun pada tingkat kecamatan semuanya harus di persiapkan mulai dari sarana prasarana sampai tenaga atau pegawai sudah siap dari sisi

ketrampilan maupun kemampuan serta pemahaman tentang pelayanan itu sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan paten ini memang solusi yang tepat dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan. Namun perlu adanya pengawasan dan pemantauan sehingga optimalisasi bisa tercipta dan bisa mengukur proses keberlangsungan kebijakan tersebut.

Namun di tempat terpisah bapak Abd Kadir Jamaludin S.STP Camat Weda Selatan mengatakan melalui wawancara dengan peneliti pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut :

“Dengan adanya pelaksanaan kebijakan PATEN di kabupaten Halmahera Tengah ini merupakan alternatif yang tepat bagi pelayanan masyarakat sekalipun baru tahap uji coba dan di lihat dari sisi biaya mungkin lebih hemat di bandingkan dengan pelayanan yang di lakukan satu pintu yang di laksanakan oleh dinas di Kabupaten atau pelayanan secara konvensional yang di lakukan oleh kecamatan, maka sasaran yang di rencanakan bisa tercapai dengan mudah”

b. Legitimasi Kebijakan

Legitimasi kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat (pooling), survey, dan lain lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Sekretaris Daerah kabupaten Halmahera Tengah Bapak Ir. Basri Amal, MM. Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Mengatakan bahwa:

“Tentunya kita dari tim teknis dari kabupaten akan memantau atau memonitoring secara berkala entah melalui laporan yang masuk maupun kita akan mengecek ke lapangan secara langsung untuk bisa melihat sejauh mana penyelenggaran paten ini bisa di rasakan oleh masyarakat”

Pada tempat terpisah hal yang sama pula di sampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah Bapak Bahri Sudirman, SH. M.H pada hari

Kamis tanggal 18 Juni 2015 mengatakan bahwa:

“saya selaku anggota tim teknis paten kabupaten maupun selaku kordinator kecamatan tentunya kami selalu melakukan evaluasi secara berkala untuk bisa melihat apakah kebijakan paten ini bisa di rasakan oleh masyarakat secara langsung atau tidak karena selama ini pelayanan publik di tingkat kecamatan masih belum maksimal di laksanakan bahkan di kabupaten Halmahera tengah sendiri baru melaksanakan tahap uji coba paten ini, jadi pada prinsipnya kami akan memantau secara sungguh sungguh”

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Abdul kadir jamaludin S.STP camat weda selatan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak kecamatan selaku penerima mandat atau delegasi dari Bupati untuk melaksanakan paten ini memang benar benar di laksanakan berdasrkan aturan yang berlaku, Artinya apa yang di perintahkan dalam aturan secara otomatis kita laksanakan sesuai dengan SOP nya sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya”

c. Metode Evaluasi

Secara umum, metode evaluasi yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif maka berdasarkan data dan informasi yang diperoleh akan dapat digambarkan (*describe*) bagaimana capaian atau kinerja kebijakan atau program, apa kendala-kendala atau masalah yang dihadapi, serta kekuatan apa yang dimiliki oleh suatu kebijakan atau program. Sementara itu, metode kualitatif lebih dimaknai sebagai proses untuk membuat data yang dikumpulkan sebagai hasil dari wawancara, observasi lapangan, telaah dokumen dan sebagainya.

Menurut Bapak Ir. Basri Amal, MM selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menurut hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 mengatakan bahwa:

“Di lihat dari segi konteks aturan dalam pelaksanaan kebijakan paten ini sudah memenuhi syarat berdasarkan SOP nya namun evaluasi tetap di laksanakan tentunya berdasarkan laporan dari pihak kecamatan mau dari pihak pihak tertentu yang

mempunyai kewenangan seperti LSM, tokoh masyarakat, dan bahkan pers yang berkompeten di bidang ini, dan tak lupa pula apa bila ada laporan dari masyarakat maka kami akan tindak lanjuti sehingga bisa mengetahui apakah kebijakan ini benar benar di rasakan oleh masyarakat atau tidak”

Asisten bidang pemerintahan dan kepomongprajaan bapak Drs. Saiful Samad M.Si. di ruang kerja pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 mengatakan bahwa:

“Kami dari tim teknis kabupaten akan melakukan monitoring ke kecamatan yang bersangkutan tentunya masyarakat akan di libatkan dalam supaya bisa kita mengukur sejauhmana pelayanan di berikan kepada masyarakat dan kendala kendala apa saja yang di alami oleh pihak kecamatan sehingga dari tim bisa dengan cepat mengambil langkah langkah untuk bisa mengatasinya”

Kepala bagian Tata pemerintahan setda Kabupaten Halmahera Tengah bapak Bahri Sudirm SH, MH pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 mengatakan bahwa:

“Melalui kebijakan pelaksanaan paten ini akan lebih mudah di kontrol atau di monitoring bahkan di evaluasi berdasrkan laopran laporan secara administrasi dari dari pihak kecamatan namun bisa kami pantau langsung ke masyarakat sehingga terjadi balance antara pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan, sehingga kendala kendala yang terjadi segera di selesaikan sehingga masyarakat jangan di korbankan”

Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif ialah evaluasi yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung tujuan evaluasi formatif ini utamanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi. Menurut Wayne Parson dalam Palumbo (1937 : 40).

Sehingga di kaitkan dengan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Weda selatan Kabupaten

Halmahera Tengah berjalan sesuai atau tidak, dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Monitoring evaluasi kebijakan

“secara umum” Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi. Sedangkan evaluasi adalah untuk melihat sebab sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah di jalankan meraih dampak yang diinginkan. Wayne Parson dalam Palumbo (2001 :549).

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah bapak Ir. Basri Amal MM. dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 mengatakan bahwa: “Evaluasi setiap triwulan berjalan untuk menilai kebijakan yang di gulirkan oleh pemerintah dengan tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu sala satunya ialah bisa mengetahui sejauh mana program itu berjalan sesuai atau tidak dengan yang di rencanakan sebelumnya dan dapat pula melihat kondisi rill artinya capaian hasil pelayanan yang terjadi sehingga kami dari tim teknis dari kabupaten dapat mengambil langkah – langkah strategis untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya”

Hal yang sama pula di sampaikan oleh Asisten bidang pemerintahan dan kecamatannya bapak Drs. Saiful Samad M.Si. pada hari Rabu tanggal 17Juni 2015 mengatakan bahwa :

“Keberhasilan pelaksanaan kebijakan paten di kabupaten Halmahera Tengah ini harus di dukung oleh semua pihak hal ini di mulai dengan dilakukannya sosialisasi tentang paten ini kepada masyarakat dan semua stakeholder, dan tentunya melakukan monitoring yang di lakukan secara bertahap untuk kita bisa melihat kekurangan kekurangan untuk dapat memastikan masalah yang sedang terjadi dalam proses penyelenggaraan paten ini sehingga kami bisa mengambil langkah langkah penyelesaiannya dengan demikian pengukuran kinerja bisa di lihat melalui kuantitas pelayanan”

Menurut Bapak Abdul kadir Jamaludin S.STP selaku Camat Weda Selatan yang di wawancarai pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 yang bertempat di ruang kerja beliau mengatakan bahwa :

“Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dilakukan tahap uji coba ini tentunya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dikarenakan sumber daya manusia, serta anggaran yang belum memadai, pemahaman pegawai kecamatan terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari sumber daya manusia yang berbeda beda latar belakang pendidikannya yang masih banyak berpendidikan tingkat SLTA. Dimana mereka tidak ada kepedulian untuk berinovasi diri dalam rangka melaksanakan tugas yang diembankan ini semua tergantung hasil evaluasi melalui monitoring dari pihak kabupaten secara berkala untuk bisa menentukan langkah langkah berikut, untuk mendorong kebijakan ini agar bisa lebih maju tentunya melalui pengembangan dan penguatan sumber daya manusia di kecamatan, maka dengan sendirinya peningkatan kinerja akan lebih baik dan menghasilkan pelayanan yang baik pula ”

Hal ini juga di benarkan oleh kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Tengah bapak Bahri Sudirman SH, MH. di ruangan kerjanya pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 mengatakan bahwa :

“Kami dari bagian tata pemerinthan setda Kabupaten Halmahera Tengah akan melakukan evaluasi terkait dengan program paten ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai koodinator kecamatan dan sekaligus sebagai sekretaris tim teknis paten ini untuk selalu berkoordinir dan memonitor dengan pihak kecamatan untuk mengikuti perkembangan program ini supaya tingkat keberhasilan bisa tercapai walaupun masih ada kekurangannya, dan upaya peningkatan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan suksesnya kebijakan ini sehingga nanti output bisa di ukur melalui seberapa jauh tingkat pelayanannya terhadap masyarakat”

Terkait penjelasan di atas maka keberadaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di kabupaten Halmahera Tengah merupakan inovasi manajemen dalam rangka meningkatkan, mempermudah dan

mempercepat pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan, Utamanya bagi kecamatan yang letaknya jauh dari kantor kabupaten/kota dan sulit dijangkau karena faktor kondisi geografis dan infrastruktur pemerintah yang belum memadai. Adapun aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam tahap uji coba ini di Kabupaten Halmahera Tengah ialah Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 50.05/KEP/91/2014

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Artinya bahwa, cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan.

Menurut Bapak Abdul kadir Jamaludin S.STP selaku Camat Weda Selatan yang di wawancarai pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 yang bertempat di ruang kerja beliau mengatakan bahwa,

“Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dikarenakan sumber daya manusia, serta anggaran yang belum memadai, pemahaman pegawai kecamatan terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari sumber daya manusia yang berbeda beda latar pendidikannya yang masih banyak berpenididkn SLTA. Dimana mereka tidak mau belajar akhirnya ketinggalan informasi yang ada.

Hal ini dapat dilihat dari ketika masyarakat datang ke kantor, masyarakat masih mendatangi setiap petugas yang berkepentingan untuk memperoleh pelayanan.

Warga masyarakat yang datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan pelayanan administrasi, seharusnya tidak perlu mendatangi petugas yang berkepentingan tetapi cukup menyerahkan berkas ke petugas pada loket pelayanan dan menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu, warga tersebut melakukan pembayaran (jika ada tarif yang

perlu dibayar) dan dicatat secara transparan.

Adapun yang menjadi keluhan warga masyarakat yang di ungkapkan oleh bapak Iksan abbas adalah warga masyarakat SP4 Desa kluting jaya Kecamatan Weda Selatan pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015 bertempat di kediaman beliau, mengatakan bahwa : pelayanan PATEN di Kecamatan Weda Selatan belum berjalan seperti yang di harapkan, Contohnya, pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) dengan waktu pengurusan lebih dari 1 minggu. Hal ini tentunya dapat merugikan kami selaku warga yang membutuhkan ijin dalam waktu cepat.

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah, dimana yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat Kecamatan Weda Selatan. Tujuan dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Weda selatan artinya masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih dekat baik secara jarak maupun waktu. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Weda selatan pun belum dapat merasakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diakibatkan oleh jarak tempuh serta lamanya waktu tempuh menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk memenuhi administrasinya dibidang perizinan. Menurut salah satu warga Desa Loleo kecamatan Weda Selatan yaitu bapak Laisana pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 mengatakan bahwa : “untuk mengurus IMB saja biaya yang di keluarkan masih cukup besar belum lagi biaya transportasi yang di keluarkan serta biaya makan minum selama pengurusan serta waktu terbit dokumennya masih sampai 1 minggu”.

Dalam mewujudkan Kecamatan Weda Selatan sebagai pusat pelayanan PATEN, tentunya perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Adapun sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Weda Selatan yaitu sumber daya manusia, personil, fasilitas dan anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kader Jamaludin S.STP selaku

Camat pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 bertempat di Kantor mengatakan bahwa : sumber daya yang mendukung pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Weda Selatan yaitu fasilitas, anggaran, personil, dan sumber daya manusia”

Jumlah Pegawai pada kantor Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah berjumlah 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil. Adapun tingkat pendidikan terakhir dari para pegawai adalah 3 (tiga) orang Sarjana, 12 (dua belas) orang SMA/SMK. Jumlah personil dan sumber daya Manusia (tingkat pendidikan) merupakan suatu modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam konteks Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), di butuhkan personil kecamatan yang profesional dalam segi kualitas maupun kuantitas. Pada kenyataannya, kondisi personil menurut hasil observasi di kantor Kecamatan Weda Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 “masih sangat kurang dalam segi kualitas dan kuantitas sehingga keprofesionalismenya masih dipertanyakan”.

Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif dilakukan pada saat implementasi sudah selesai dilakukan dan berfokus pada penilaian tentang sejauh mana hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan. Kriteria penilaian yang digunakan dalam (Wayne Parsons (2001, h. 549) yang diadaptasi dari Palumbo). evaluasi sumatif antara lain adalah sebagai berikut :

a. Ukuran Efektifitas Evaluasi

1. Efisiensi, suatu kebijakan harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya secara optimal
2. Adil, bobot kebijakan harus ditempatkan secara adil yakni kepentingan publik tidak terabaikan
3. Mengarah kepada insentif, suatu kebijakan harus mengarah kepada atau merangsang tindakan dalam perbaikan dan peningkatan sasaran yang ditetapkan
4. Diterima oleh publik, oleh karena diperuntukkan bagi kepentingan publik maka kebijakan yang baik harus diterima oleh publik

5. Moral, suatu kebijakan harus dilandasi oleh moral yang baik
Tujuan pokok evaluasi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik.

b. Dampak Evaluasi kebijakan

Dampak evaluasi kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan –kebijakan tersebut

c. Dukungan dalam pelaksanaan Evaluasi kebijakan

Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dinilai dari segi efektifitasnya, belum berjalan secara efektif. Hal ini diukur dari pemberian pelayanan yang belum memenuhi standar ditinjau dari jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai janji penyelenggaraan/pemberi layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Dokumen standar pelayanan sangat penting untuk dirumuskan sebagai bagian dari transparansi dan kepastian pelayanan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dengan adanya standar pelayanan ini maka masyarakat pencari pelayanan dan juga aparatur selaku pemberi pelayanan sama-sama mempunyai pedoman yang jelas secara normatif dalam proses pelayanan yang dilaksanakan.

Terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Weda Selatan telah diberlakukan standar pelayanan namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bupati Halmahera Tengah bapak M. AL YASIN ALI pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 di ruang kerja mengatakan bahwa :

“Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Halmahera Tengah ini masih dalam tahap uji coba selama dua tahun, ini berdasarkan pertimbangan terkait dengan kondisi secara keseluruhan yakni, anggarannya, jumlah personil di lapangannya, sarana dan prasarana dan yang paling penting adalah SDM yang belum siap, namun kami merasa bahwa dalam tahap uji coba ini dievaluasi nyata semua komponen yang ada benar benar siap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tentu juga saya selaku pimpinan daerah dan DPRD secara politik mendukung dengan sepenuh untuk bisa memajukan daerah ini sehingga sasaran pembangunan terutama di bidang pelayanan publik di daerah ini bisa berjalan seperti daerah lain, dan faktor dukunga eksternal saya rasa semuanya mendukung program ini karena tujuan dari kebijakan yang di keluarka oleh pemerintah itu tentunya untuk kepentingan semua orang atau masyarakat. Dalam setiap kebijaka yang di ambil oleh pemerintah atau di tetapkan pemerintah tentunya mengalami hambatan hambatan entah dari internal maupun dari eksternal dan itu tidak bisa di pungkiri, maka secara teori setiap kebijakan yang akan di keluarkan itu harus melalui suatu kajian secara teknis yang mendalam sehingga terbangun kesamaan makna atau persepsi di antara para pelaksana kebijakan itu. Dan dalam tahap uji coba ini tapi bagi saya memang masih banyak kekurangan kekurangan sesuai hasil pantauan berdasarkan laporan di lapangan menunjukan bahwa

Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana bersifat mendorong kebijakan atau menghambat kebijakan tersebut. Berikut adalah hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan PATEN.

Faktor-faktor Pendorong.

Berdasarkan hasil waancara dan observasi dapat disimpulkan ada beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong Kebijakan pelaksanaan PATEN tersebut yaitu :

1. Komitmen dan kemauan politik pimpinan daerah dan pusat
2. Visi dan misi yang jelas
3. Kelembagaan setingkat Eselon IIa
4. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan
5. Kewenangan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan administrasi perizinan terpadu
6. Jumlah SDM aparatur yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan terpadu
7. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukungpelaksanan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan serta tersedianya sistem informasi pelayanan administrasi perizinan

Faktor-Faktor Penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang dapat menghambat kebijakan pelaksanaan PATEN tersebut yaitu:

1. Belum tercerminnya penjabaran komitmen pimpinan dalam program dan kegiatan pada OPD terkait
2. Belum tersusunnya SOP untuk mewujudkan penjabaran dari visi – misi organisasi
3. Belum adanya pedoman standar pelayanan minimal.
4. Belum jelas tugas dan fungsi Tim teknis sehingga pelaksanaan perizinan belum sepenuhnya efektif
5. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
6. Inkonsisiten dan kurangnya dukungan pemangku kepentingan dalam penerapan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan
7. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan

8. Masih lemahnya pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dengan tim teknis di OPD dan belum terlaksananya pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur BPPT
9. Sarana dan Prasarana belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya belum optimalnya penerapan sistem informasi yang berbasis TIK.

Strategi Yang Dapat dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan.

Guna merumuskan strategi evaluasi kebijakan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Weda Selatan maka dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT yaitu analisis yang mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Empat unsur yang selalu dihadapi dan dimiliki oleh suatu organisasi, secara internal memiliki kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness) serta secara eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) akan menghasilkan ide-ide serta tujuan yang membantu mengidentifikasi kondisi permasalahan.

1. Kekuatan

Dari penelitian ditemukan faktor internal berupa kekuatan (strengths) dalam mengevaluasi kebijakan pelaksanaan Paten antara lain :

- a. Komitmen dan kemauan politik pimpinan daerah dan pusat
- b. Visi dan misi yang jelas
- c. Kelembagaan setingkat Eselon IIa
- d. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan
- e. Kewenangan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan administrasi perizinan terpadu
- f. Jumlah SDM aparatur yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan terpadu

- g. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan serta tersedianya sistem informasi pelayanan administrasi perizinan

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Melalui faktor internal organisasi dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan disadari adanya kelemahan yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Belum tercerminnya penjabaran komitmen pimpinan dalam program dan kegiatan pada OPD terkait
- b. Belum tersusunnya SOP untuk mewujudkan penjabaran dari visi – misi organisasi
- c. Belum adanya pedoman standar pelayanan minimal.
- d. Belum jelas tugas dan fungsi Tim teknis sehingga pelaksanaan perizinan belum sepenuhnya efektif
- e. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- f. Inkonsisten dan kurangnya dukungan pemangku kepentingan dalam penerapan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan
- g. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan
- h. Masih lemahnya pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dengan tim teknis di OPD dan belum terlaksananya pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur BPPT
- i. Sarana dan Prasarana belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya belum optimalnya penerapan sistem informasi yang berbasis TIK.

3. Peluang (*Opportunities*)

Melalui hasil analisis dapat diidentifikasi peluang (*Opportunities*) berupa Mewujudkan komitmen pemerintah dalam usaha perbaikan iklim berusaha di

kecamatan Weda selatan Kab. HALTENG melalui peningkata pelayanan administrasi perizinan yang Totality Quality Managemant (TQM), akuntabel ,dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

4. Ancaman (*Threats*)

Melalui faktor eksternal selain ada peluang juga terdapat ancaman yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh badan pelayanan perizinan Terpadu kecamatan Weda Selatan adalah :

- a. Masih adanya dualisme kebijakan mengenai PTSP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu PTSP bidang investasi sebagaimana dimaksud perpres No. 27 tahun 2009 dan PPTSP di bidang pelayanan publik non investasi sebgaimana dimaksud prespres No. 24 Tahun 2006, sehingga menjadi kendala bagi daerah untuk mengembangkan kelembagaan PTSP yang efektif dan efesien
- b. Belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari pada UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- c. Belum tersosialisasinya administrasi pelayanan perizinan

Komunikasi dan sosialisasi yang kurang terjalin dengan intens dan belum adanya pemahaman yang sama antara BPPT dengan stakeholder terkait (OPD provinsi dan publik) dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan administrasi perizinan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

10. Evaluasi kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dinilai belum berjalan maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan perizinan, yang dinilai berdasarkan evaluasi proses, evaluasi formatif, dan sumatif.
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Evaluasi kebijakan pelaksanaan pelayan administrasi terpadu

kecamatan di Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah ini yaitu :

- a. Faktor pendukung antara lain : adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan daerah dan pusat, Visi dan misi yang jelas, kelembagaan setingkat Eselon IIa, kewenangan melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan, kewenangan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan administrasi perizinan terpadu, jumlah SDM aparatur yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan terpadu, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukungpelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan serta tersedianya sistem informasi pelayanan administrasi perizinan.
- b. Penghambat antara lain : belum tercerminnya penjabaran komitmen pimpinan dalam program dan kegiatan pada OPD terkait, belum tersusunnya SOP untuk mewujudkan penjabaran dari visi – misi organisasi, belum adanya pedoman standar pelayanan minimal, belum jelas tugas dan fungsi Tim teknis sehingga pelaksanaan perizinan belum sepenuhnya efektif, struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Inkonsisiten dan kurangnya dukungan pemangku kepentingan dalam penerapan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan, belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan, masih lemahnya pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dengan tim teknis di OPD dan belum terlaksana nya pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur BPPT, sarana dan Prasarana belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya belum optimalnya penerapan sistem informasi yang berbasis TIK.

3. Terdapat 11 (sebelas) langkah-langkah strategi yaitu :
 - a. Manfaatkan Komitmen Pimpinan daerah untuk mengembangkan pelayanan prima;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur daerah (kualitas dan kuantitas) sangat diperlukan karena ketimpangan jumlah SDM dan beban kerja yang ditanggung masih belum ideal.
 - c. Menciptakan Peraturan Daerah / Bupati tentang SOP
 - d. Mekanisme kerja pelayanan perizinan (biaya, syarat administrasi, reward and punishment, pengawasan internal dan eksternal, serta prosedur pengaduan) harus dibuat dengan jelas untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik.,
 - e. Tingkatkan SDM pelayanan
 - f. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan perizinan agar standarisasi yang bisa dimonitoring dan dievaluasi untuk menghindari kesalahan baik dalam penyelenggaraan maupun ketentuan dasar pemberian izin dalam pemanfaatan lahan yang tidak berdasar kesesuaian lahan
 - g. Partisipasi pihak swasta dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana patut didorong dan dikembangkan
 - h. Diperlukan integrasi dalam memformulasikan peraturan perizinan usaha dan turunan peraturan lainnya
 - i. Perlu dibentuk koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar instansi dan kesinambungan pembinaan dinas teknis terkait.
 - j. Tingkatkan kualitas SDM aparat pengelola untuk melaksanakan reformasi di bidang perizinan
 - k. Melaksanakan sosialisai untuk meningkatkan pemahaman antara instansi terkait maupun masyarakat dalam pengurusan perizinan

Saran.

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar kebijakan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan dapat berjalan maksimal, maka hendaknya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah agar

melaksanakan pelayanan perizinan yang dinilai berdasarkan indiktor evaluasi proses, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

2. Agar dalam melaksanakan kebijakan ini, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pelayanan Terpadu kecamatan yakni perjelasan tugas dan fungsi Tim teknis sehingga pelaksanaan perizinan bisa berjalan efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kebutuhan dan kepentingan fungsi pelayanan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dengan tim teknis di OPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur BPPT
3. Penulis berharap agar pemerintah Halmahera Tengah dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategis sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kebijakan Pelayanan terpadu Kecamatan melalui Manfaatkan Komitmen Pimpinan daerah untuk mengembangkan pelayanan prima, peningkatan kapasitas aparatur daerah (kualitas dan kuantitas) sangat diperlukan karena ketimpangan jumlah SDM dan beban kerja yang ditanggung masih belum ideal, menciptakan Peraturan Daerah / Bupati tentang SOP, mekanisme kerja pelayanan perizinan (biaya, syarat administrasi, reward and punishment, pengawasan internal dan eksternal, serta prosedur pengaduan) harus dibuat dengan jelas untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik, tingkatkan SDM pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan perizinan agar standarisasi yang bisa dimonitoring dan dievaluasi untuk menghindari kesalahan baik dalam penyelenggaraan maupun ketentuan dasar pemberian izin dalam pemanfaatan lahan yang tidak berdasar kesesuaian lahan, partisipasi pihak swasta dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana patut didorong dan dikembangkan, diperlukan integrasi dalam memformulasikan peraturan perizinan usaha dan turunan peraturan lainnya, perlu dibentuk koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar instansi dan kesinambungan pembinaan dinas teknis terkait.

Daftar Pustaka

- Akmal, Roni. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*. Universitas Andalas. Sumatra Barat
- Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Bandung.
- Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV.Alfabeta, Bandung
- Bryson M, John. 2007 *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Pustaka Patton, Jogjakarta
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Dunn, William, N, 1992, *Analisis Kebijakan Publik, diterjemahkan oleh Muhajir PT. Hanindita*, Jogjakarta.
- Dunn, William, N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : edisi ke 2*, Gajahmada University Press, Jogjakarta.
- Heene, A., Desmidt, S., Afiff, F., & Abdullah, I. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamdi, Muchlis, 1999, *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah : Kebijakan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah (Strategis Implementasi dalam Prespektif Provinsi Kepulauan)*, IIP, Jakarta
- Hamdi, Muchlis, 2014, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gafamedia, Jogjakarta
- Jaweng, 2012, *Kualits Pelayanan Publik*, Gava Media, Jogjakarta.
- Muhadam Labolo, 2012, *Dinamika Demokrasi, Polotik dan Pemerintahan Daerah, Raja Grafindo Persada*,
- Nugroho Riant Dr. 2012, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Nawawi, 2009, *Public Policy, Analisis, Starateg, Advokas, teori dan praktek*, PMN, Surabaya.
- Ndarha, Taliziduhu, 2008, *Kybernologi Sebuah Metamorphossis*, Sirao Credentia Center, Tangerang.
- Nasir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi H. Abu, 2010, *Metedologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho, R. 2011. *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Parsosn, Wayne, 2001, *Public Policy*, Prenada Media, Jakarta
- Purwandari, 1998, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologis*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Patton,Quinn,Michael, 2002,"*Qualitative Research & Evaluation Methods*, Sage Publications Inc.,California.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sinambela, 2011, *Solusi Bisnis dari Seberang*, Afton Asia, Jakarta.
- Sinambela, dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Impelentasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV.Alfabeta: Bandung.

Solihin, Ismail, 2012, *Manajemen Strategis*, Erlangga, Jakarta.

Tohirin. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wasistiono. 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Fokus Media, Bandung.

Winarno, 2012, *Kebijakan Publik : Teory, Proses dan Study Kasus (Edisi Revisi)*, CAPS, Jakarta

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. PT Buku Kita, Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Jogjakarta

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Pelayanan Adminsitras Terpadu Kecamatan*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang pelaksanaan teknik Pelayanan Administarsi Terpadu Kecamatan

B. SUMBER-SUMBER LAIN.

www.kemendagri.co.id